

## ABSTRAKSI

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bandung mempunyai visi yaitu sejajar dengan institusi kepabeanan dan Cukai dunia di bidang kinerja dan citra. Visi ini dijabarkan dalam penetapan strategi-strategi yaitu Profesionalisme, Efisiensi, dan Pelayanan yang berguna dalam proses kinerja pegawai. Strategi ini tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh SDM atau pegawai yang berkualitas dan berkompeten. Dalam rangka pengembangan pegawai yang mampu mendukung strategi dan meningkatkan kualitas kinerja, maka perlu dilandasi dengan strategi pengelolaan pegawai yang tepat. Oleh sebab itu sub bagian umum kepegawaian Kantor Bea dan Cukai membutuhkan informasi dalam suatu sistem yang berbasis komputer (*computer based information*). Kebutuhan ini berkaitan dengan seluruh proses dalam pengelolaan pegawai seperti kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, mutasi, pendidikan dinas, penindakan, berhenti, dan pensiun. Pengelolaan pegawai ini melibatkan banyak aspek walaupun dalam sistem ini tidak terlibat secara langsung, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi kepala kantor dalam mengambil keputusan menyangkut pegawai kantor bea dan cukai. Pengelolaan ini dinamakan perancangan sistem informasi kepegawaian yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan keberadaan pegawai di kantor tersebut.

Perancangan sistem informasi ini dilakukan berdasarkan pengembangan metode hasil studi literatur dan studi lapangan. Metode yang digunakan adalah *waterfall* yang meliputi aktivitas analisis, design, pengkodean, dan test. Metode tersebut disesuaikan dengan keberadaan prosedur eksisting yang terdapat di kantor bea dan cukai sehingga dapat menciptakan prosedur usulan yang memudahkan dalam pengelolaan pegawai.

Dengan adanya sistem informasi ini sebagai sistem baru, diharapkan dapat membantu pihak kepegawaian dalam proses administrasi pegawai, dan dengan adanya model yang dikembangkan melalui pengamatan di lapangan, maka sistem informasi ini sesuai untuk diterapkan

Secara garis besar, sistem yang baru ini dapat berguna sebagai alat bantu pihak *user* dalam mengolah data-data yang berkaitan dengan proses pengelolaan kepegawaian dan secara tidak langsung mampu menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.